



DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SOLOK

RENCANA KERJA **RENJA** **2027**



dppkabsolok@gmail.com



dppkabsolok



dppkabsolok



Jl. Raya Koto Baru No. 63, Koto Baru - Solok

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2027 dapat diselesaikan. Substansi Renja Dinas Perikanan dan Pangan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan. Dimana dalam Renstra tersebut dimuat, Strategi, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2025 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tujuan penyusunan Renja adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan dan pangan Kabupaten Solok selama satu tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya dapat menyentuh kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemberdayaan dan pemanfaatan potensi daerah.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Pangan adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Solok.

Koto Baru, Juli 2026
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Solok



Ir. SYOUFITRI, M.M
NIP. 197011152005022002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 2
1.3 Maksud Tujuan	I - 3
1.4 Sistematika Penulisan	I - 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II - 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II - 23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III - 4
3.3 Program dan Kegiatan	III - 5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	IV - 1
BAB V PENUTUP	V - 1

DAFTAR TABEL

2.1	Indikator Pengukur Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Yang Berdaya Saing	II - 1
2.2	Perkembangan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Solok Tahun 2023-2025	II - 1
2.3	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2023-2025	II - 2
2.4	Produksi Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2023-2025	II - 2
2.5	Produksi Perikanan Perairan Umum atau Tangkap Kabupaten Solok Tahun 2023-2025	II - 2
2.6	Produksi Budidaya Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2023-2025 Berdasarkan Lokasi Usaha	II - 3
2.7	Produksi Budidaya Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2023-2025 Berdasarkan Komoditi	II - 3
2.8	Indikator Pengukuran Sasaran Meningkatnya Pengolahan, Pemasaran dan Konsumsi Ikan	II - 4
2.9	Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2023-2025	II - 5
2.10	Indikator Pengukuran Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan	II - 5
2.11	Indikator Pengukur Sasaran Terkendalinya Harga Pangan Utama di Pasaran	II - 7
2.12	Coefisien Variasi (CV) Per Komoditi Pangan Strategis Ditingkat Konsumen dan Produsen Tahun 2025	II - 7
2.13	Indikator Pengukur Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar	II - 9
2.14	Perkembangan Ketersediaan Bahan Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi Masyarakat Tahun 2022-2024	II - 9
2.15	Indikator Pengukur Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	II - 10
2.16	Indikator Pengukur Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	II - 11
2.17	Skala Pengukuran	II - 11
2.18	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Perikanan Dan Pangan Kabupaten Solok	II - 14
2.19	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok	II - 20
2.20	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Solok	II - 25
3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2027	III - 5

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 9 TAHUN : 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pendanaannya. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 16 dan pasal 126 bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang akan dijadikan bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, penyusunan awal rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang didasari dari dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang kemudian akan dituangkan draf rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah. Draft rancangan Renja Perangkat Daerah inilah yang akan dibawa pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musrenbang RKPD serta mengakomodir hasil dari Musrenbang tersebut. Hasil perumusan akhir rancangan RKPD akan ditetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Bupati dan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi Dokumen Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, dimana arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok dituangkan melalui program dan



kegiatan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dan dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Dengan demikian penyusunan Renja ditujukan untuk menjawab sasaran dan tujuan RPJMD dan Renstra melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dijabarkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dan hubungannya dengan Renja Kementerian/Lembaga terkait dan Renja propinsi dengan adanya sinergitas antara ketiga dokumen perencanaan kerja (Renja) tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2026 mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;



10. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2027 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2027 untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan terkini serta penyesuaian rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2027 yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memberikan gambaran mendasar mengenai latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum yang menjadi pijakan regulasi, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, serta uraian mengenai sistematika penulisan itu sendiri. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami kerangka pikir keseluruhan dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

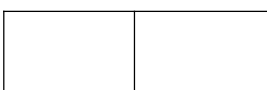
Menyajikan analisis mengenai realisasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD. Bab ini juga memuat evaluasi terhadap capaian target Renstra-PD, analisis kinerja pelayanan, hingga identifikasi isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Selain itu, dipaparkan pula reviu terhadap rancangan awal RKPD serta hasil penelaahan atas usulan program dan kegiatan yang datang dari aspirasi masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bagian ini fokus membahas penyelarasan kebijakan melalui telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi serta menurunkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan dan Pangan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat daftar program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta besaran pagu indikatif untuk tahun 2027. Selain itu, dipaparkan pula perkiraan maju untuk tahun 2028 sesuai dengan data yang tertuang dalam sistem SIPD-RI, guna menjamin keberlanjutan perencanaan dan penganggaran.



Bab V Penutup

Merangkum berbagai catatan penting yang memerlukan perhatian khusus, baik dalam tahap pelaksanaan maupun sebagai langkah antisipasi apabila terjadi ketidaksesuaian ketersediaan anggaran dengan kebutuhan di lapangan. Bab ini juga menegaskan kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipatuhi serta rencana tindak lanjut yang perlu diambil demi menjamin efektivitas implementasi seluruh rencana yang telah disusun.

--	--

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Capaian kinerja di bidang perikanan dan ketahanan pangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN YANG BERDAYA SAING

Produksi perikanan merupakan semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi ikan Kabupaten Solok diperoleh dari produksi perikanan perairan umum/tangkap (sungai, danau, telaga, rawa) dan dari perikanan budidaya di kolam, sawah, saluran irigasi, karamba jaring apung, kolam air deras dan karamba.

Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.1 : Indikator Pengukur Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan yang Berdaya Saing

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Persentase peningkatan produksi perikanan	(35,81)%	8,55%	9,84%	115,08%

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 capaian kinerja persentase peningkatan produksi perikanan sangat baik dengan target kinerja 8,55% dan realisasi 9,84%. Pencapaian ini termasuk kategori Sangat Baik.

Perkembangan capaian target peningkatan produksi perikanan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Perkembangan Peningkatan Produksi Perikanan di Kabupaten Solok Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian			Target Thn 2030	% Capaian Renstra
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	12	13	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase peningkatan produksi perikanan	7,91	8,23	8,55	10,17	8,82	9,84	128,57	107,17	115,08	8,61	114,28

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi perikanan pada tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana laju pertumbuhan produksi perikanan berikut:

Tabel 2.3 : Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2023-2025

No	Uraian	Pertumbuhan Produksi (%)		
		2023	2024	2025
1	Produksi perikanan budidaya	9,56	9,86	7,66
2	Pertumbuhan produksi perikanan perairan umum	13,51	9,83	12,08
Total pertumbuhan produksi perikanan Kab. Solok		10,17	8,82	9,84

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025

Dibandingkan dari tahun sebelumnya capaian kinerja peningkatan produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 9,84% dibanding tahun 2024 sebesar 8,82%. Jika dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa peningkatan produksi perikanan disebabkan oleh kenaikan produksi perikanan perairan umum sebesar 12,08% namun produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sebesar 7,66% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 9,86%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan induk ikan yang berkualitas nihil di semua UPR serta pengaruh cuaca kemarau berkepanjangan pada awal tahun dan bencana banjir longsor di akhir tahun.

Persentase peningkatan produksi perikanan dengan target akhir periode yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis (Renstra) yakni persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 8,61% sudah melebihi target sampai akhir periode Renstra dengan capaian renstra tahun 2025 sebesar 9,84%.Produksi perikanan tahun 2023-2025 baik produksi budidaya maupun produksi perairan umum dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.4 : Produksi Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2023 – 2025

No	Uraian	Realisasi (ton)		
		2023	2024	2025
1	Produksi perikanan budidaya	4.912,25	5.321,46	5.199,28
2	Produksi perikanan perairan umum	934,28	1.044,87	1.068,43
Jumlah		5.846,53	6.366,33	6.267,71

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025

Produksi perikanan perairan umum/tangkap tahun 2023-2025 berdasarkan jenis perairan umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 : Produksi Perikanan Perikanan Perairan Umum/Tangkap Tahun 2023 – 2025

No	Uraian	Produksi (ton)		
		2023	2024	2025
1	Danau	667,20	752,65	788,31
2	Sungai	210,70	227,61	214,99
3	Rawa	13,70	18,32	45,39



4	Genangan Air Lainnya	42,68	46,29	19,74
Total		934,28	1.044,87	1.068,43

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025

Capaian kinerja peningkatan produksi perikanan perairan umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 12,08%. Sedangkan data produksi perikanan budidaya dari tahun 2023-2025 berdasarkan lokasi pembesarannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6 : Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2023 – 2025 Berdasarkan Lokasi Usaha

No	Budidaya	Produksi (ton)		
		2023	2024	2025
1	Sawah	256,56	279,14	280,14
2	Kolam	2698,99	2.917,05	2.884,78
3	Saluran irigasi	266,14	289,66	286,06
4	Kolam Air Deras	854,87	928,37	843,17
5	Karamba Jaring Apung	835,05	906,97	904,43
6	Karamba	0,64	0,27	0,70
Total		2.912,25	5.321,46	5.199,28

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025

Capaian kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,66%. Hal ini dikarenakan ketersediaan induk ikan yang berkualitas nihil di semua UPR serta pengaruh cuaca kemarau berkepanjangan pada awal tahun dan bencana banjir longsor di akhir tahun. Produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan dan lokasi pembesarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7 : Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2023 – 2025 berdasarkan Komoditi

No	Jenis Ikan	Produksi						Jumlah
		Kolam	Sawah	KJA	KAD	SI	Karamba	
1	Mas	426,74	132,34	251,47	327,77	102,74	0,08	1.241,14
2	Nila	1.529,11	147,80	652,97	515,39	183,32	0,62	3.029,21
3	Lele	912,12	-	-	-	-	-	912,12
4	Gurami	9,21	-	-	-	-	-	9,21
5	Patin	7,60	-	-	-	-	-	7,60
	2025	2.884,78	280,14	904,43	843,17	286,06	0,70	5.199,28
	2024	2.916,98	279,14	906,97	928,37	389,66	0,70	5.321,46
	2023	2.698,99	256,56	835,05	854,88	266,14	0,64	4.912,25
	2022	2.442,34	231,72	755,44	773,53	240,28	0,58	4.443,88

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025

Walaupun target kinerja produksi perikanan pada tahun 2025 sudah memenuhi target namun masih ditemukannya beberapa kendala dan permasalahan terutama pada produksi budidaya perikanan yang disebabkan oleh berbagai faktor yakni:

--	--

1. Mahalnya biaya produksi terutama biaya pakan pabrikan sementara harga jual ikan tidak mengalami peningkatan
2. Induk pada Unit Pemenihan Rakyat (UPR) sudah tidak layak pakai (tidak produktif) yang mengakibatkan produksi benih rendah dan pertumbuhan yang lambat
3. Sudah rendahnya tingkat produksi karamba yang berproduksi di Kabupaten Solok akibat kesulitan dalam modal usaha dan karamba yang ada sudah tidak layak lagi dipakai
4. Tidak berfungsinya mesin pembuatan pakan yang ada pada kelompok karena kesulitan dalam memperoleh bahan baku
5. Belum adanya sistem plasma di sektor perikanan yang menopang permodalan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Solok

Sedangkan pada perairan umum, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 12,08 % hal ini disebabkan beberapa faktor pendorong ketersediaan sumber daya ikan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, dan efisiensi operasional seperti ketersediaan bahan bakar. Peningkatan produksi sangat bergantung pada kombinasi optimal antara input produksi (alat) dan efisiensi operasional nelayan.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN KONSUMSI IKAN

Sasaran Meningkatnya pengolahan, pemasaran dan konsumsi ikan diukur dari Angka Konsumsi Ikan. Angka Konsumsi Ikan adalah tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita. Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8 : Indikator Pengukur Sasaran Meningkatnya Pengolahan, Pemasaran dan Konsumsi Ikan

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	36,05 kg/kap	21,97 kg/kap	20,05 kg/kap	91,22%

Sumber : Kementerian Kelautan Dan Perikanan 2026

Pada tahun 2021-2024, Angka Konsumsi Ikan dihitung dari Konsumsi ikan di dalam rumah tangga (data Susenas) ditambah dengan Konsumsi ikan diluar rumah tangga ditambah dengan Konsumsi ikan tidak tercatat. Namun, pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 terjadi perubahan formula perhitungan angka konsumsi ikan yaitu hanya menghitung konsumsi ikan dalam rumah tangga saja. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat data konsumsi domestik sebagai bagian dari peningkatan jaminan mutu dan daya saing hasil perikanan.

Perkembangan capaian target kinerja Angka Konsumsi Ikan beberapa tahun terakhir dapat digambarkan dengan tabel berikut :

--	--

Tabel 2.9 : Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian			Target Thn 2030	% Capaian Renstra
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap)	39,15	40,1	21,98	41,89	42,39	20,05	110,27	105,71	91,22	23	87,17

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan angka yang signifikan padahal kondisi sebenarnya masih dengan makna yang sama, hanya perubahan formula penghitungan. Angka konsumsi ikan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Laju pertumbuhan angka konsumsi ikan pada tahun 2024 sebesar sebesar 105,71% dan pada tahun 2025 sebesar 91,22%.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Rata-rata harga komoditas perikanan (yang menjadi preferensi utama masyarakat) pada tingkat konsumen akhir memiliki harga lebih tinggi dibanding sumber protein kompetitor (telur, ayam)
2. Ketidakesesuaian antara produksi dengan preferensi konsumsi masyarakat di tingkat lokal, serta
3. Budaya makan ikan belum merata dan adanya anggapan negatif tentang ikan.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis (Renstra), belum mencapai angka yang di targetkan, yaitu 23 kg/kap. Agar tercapainya target sasaran kinerja pengolahan, pemasaran dan konsumsi ikan beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Semakin beragamnya olahan hasil perikanan dan dipasarkan dengan harga yang terjangkau
2. Semakin meningkatnya usaha pengolahan perikanan di masyarakat
3. Semakin meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan dengan adanya program Gerakan Gemar Makan Ikan sampai ke tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Meningkatnya jumlah rumah makan yang menyediakan dengan menu ikan.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Sasaran kinerja Meningkatnya ketersediaan pangan dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.10 : Indikator Pengukur Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita	594,47 kg/kap/thn	657,4 kg/kap/thn	431,05 kg/kap/thn	65,56%

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025



Ketersediaan dapat diukur dengan formulasi jumlah rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun dibagi dengan jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil. Ketersediaan pangan utama perkapita pada tahun 2025 sebesar 431,05 kg/kap/tahun didapat dari rata-rata ketersediaan pangan utama 179.077.000 kg dan jumlah penduduk 415.440 jiwa. Penghitungan angka ketersediaan pangan diperoleh melalui aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM) yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 capaian kinerja terjaganya ketersediaan pangan adalah 65,56% dengan target kinerja 657,4 kg/kap/thn dan realisasi 431,05 kg/kap/thn. Pencapaian ini termasuk kategori Cukup. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti produksi pangan yang menurun dan telah banyaknya alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi pemukiman dan perladangan. Ditambah dengan faktor cuaca yang tidak menentu dan terjadinya bencana banjir bandang dan longsor membuat hasil panen yang kurang dari harapan.

Ketersediaan pangan utama (beras) sebesar 179.077 ton, jika dikonversi ke ketersediaan pangan utama perkapita akan diperoleh sebesar 431,05 kg/kapita/tahun. Sedangkan kebutuhan pangan sebesar 54.156 kg/kapita/thn.

Ketersediaan pangan utama (beras) Kabupaten Solok diperoleh dari produksi daerah sendiri. Total ketersediaan beras tahun 2025 sebesar 179.077 ton, menurun sebesar 1.108 ton dari tahun 2024 yaitu ketersediaan sebesar 180.185 ton. Ketersediaan pangan baik dari segi natura maupun dari segi nilai gizinya melebihi target yang telah ditetapkan/disarankan WNPg. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Solok aman dan tidak kekurangan dari segi ketersediaan bahan pangan utama yakni beras dan ketersediaan pangan lainnya, tetapi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok. Tidak tercapainya target sasaran Meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Solok disebabkan karena :

1. Produksi padi mengalami peningkatan namun tidak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Produksi padi tahun 2025 sebesar 301.381 ton sedangkan jumlah penduduk 415.440 jiwa
2. Perubahan budaya masyarakat dalam pencadangan pangan. Masyarakat langsung menjual gabah pada waktu panen tanpa adanya stok untuk rumah tangga
3. Berkurangnya luas lahan produktif akibat alih fungsi lahan sehingga berdampak pada ketersediaan pangan
4. Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah rawan bencana sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan
5. Terjadinya kemarau panjang pada awal tahun 2025 dan bencana banjir longsor pada akhir tahun 2025.

Walaupun terjadi penurunan ketersediaan pangan utama pada tahun 2025, tetapi Kabupaten Solok masih tetap surplus beras dibandingkan dengan kebutuhan. Kebutuhan beras tahun 2025 di Kabupaten Solok sebesar 54.156 ton, sementara ketersediaan beras sebesar 179.077 ton. Hal ini menunjukkan adanya surplus beras sebesar 124.921 ton.

SASARAN 4 : TERKENDALINYA HARGA DAN LANCARNYA AKSESIBILITAS PANGAN MASYARAKAT

Terkendalnya harga dan lancarnya aksesibilitas pangan masyarakat menunjukkan stabilnya harga pangan ditingkat konsumen dan produsen.



Gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidak cukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan oleh rendahnya produksi dan gangguan pada proses distribusi yang disebabkan dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan OPT dan kurang baiknya sarana transportasi maupun akses transportasi.

Sasaran terkendalinya harga pangan utama dipasaran dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.11 : Indikator Pengukur Sasaran Terkendalinya Harga Pangan Utama Dipasaran

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen (Coefisien Variasi)	5,87%	9,80%	12,08%	81,12%

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025

Terkendalinya harga pangan utama dipasaran dapat diukur dari fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen yang dihitung dari jumlah rata-rata Coefisien Variasi (CV) ditingkat konsumen, Sedangkan penghitungan Coefisien Variasi (CV) dihitung dari jumlah harga komoditi pangan strategis dalam setahun dibagi dengan harga rata-rata dalam setahun. Dimana jumlah rata-rata Coefisien Variasi (CV) ditingkat konsumen dan produsen sebesar 12,08% yang diperoleh dari rata-rata angka Coefisien Variasi (CV) konsumen 11,51% dan angka Coefisien Variasi (CV) produsen 14,13%.

Perolehan angka Coefisien Variasi (CV) masing-masing komoditi ditingkat konsumsi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.12 : Coefisien Variasi (CV) Per Komodoti Pangan Strategis Ditingkat Konsumen dan Produsen Tahun 2025

No	Komoditi	Standar Deviasi Jumlah Rata-rata Harga komoditi pangan strategis		Rata-rata Harga Komodoti Strategis Dalam Satu Tahun		CV		Ket
		Konsumen	Produsen	Konsumen	Produsen	Konsumen	Produsen	
1	Beras Premium	359	474	16.896	14.519	2.12	3.26	
2	Beras Medium	808	630	13.460	15.767	5.13	4.68	
3	Beras Termurah	5.524	4.426	9.093	7.224	60.75	61.27	
4	Gula Pasir Lokal	297	637	17.914	14.720	1.66	4.33	
5	Bawang Merah	4.172	2.904	29.465	21.062	14.16	13.79	
6	Bawang putih (bonggol)	2.489	2.290	39.510	31.257	6.30	7.32	
7	Cabai Merah Keriting	17.081	20.639	51.386	39.156	33.24	52.71	
8	Daging Ayam Ras	2.678	5.380	30.876	24.181	8.67	22.25	
9	Telur Ayam Ras	1.098	1.530	26.692	23.030	4.11	6.64	
10	Daging Sapi Murni	2.309		139.333		1.66		
11	Minyak Goreng	875	1.430	17.605	16.000	4.97	8.60	
12	Tepung Terigu	396	466	9.131	6.000	4.34	8.48	
Rata-rata						11.51	14.13	

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025



Pada tahun 2025 capaian kinerja terkendalinya harga pangan utama di tingkat konsumen adalah 81,12% dengan target kinerja fluktuasi harga pangan ditingkat konsumen 9,8% dan realisasi 12,08%. Pencapaian ini sudah kurang baik karena lebih besar dari target yang ditetapkan.

Pencapaian ini pun dianggap kurang baik karena melebihi dari target. Hal ini dikarenakan terjadinya kemarau yang panjang pada awal tahun dan bencana banjir longsor di akhir tahun 2025 menyebabkan fluktuasi harga yang tinggi pada komoditas harga bawang putih, cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Harga pangan utama ditingkat konsumen dan produsen dinyatakan stabil apabila CV <10%. Semakin <10% Coefisien Variasi semakin stabil harga pangan.

Solusi yang dilakukan pada tahun 2025 untuk pencapaian sasaran kinerja ini pada adalah :

1. Pembinaan bagi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) serta penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat. Pembinaan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Gapoktan di wilayah sentra produksi padi agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/mengolah hasil produksi pangannya disaat menghadapi panen raya mampu menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi paceklik
2. Operasi khusus (opsus) melalui Toko Tani Indonesia, gelar pangan murah dan bazar pada hari-hari besar keagamaan
3. Pemantauan harga pangan dilakukan setiap hari oleh enumerator harga pangan. Untuk pemantauan harga pangan ditingkat produsen dilakukan pada Kec. Gunung Talang, Bukit Sundi dan Kubung. Sedangkan untuk tingkat konsumen dilakukan di pasar Muara Panas, Pasar Selayo, Pasar Talang dan Pasar Cupak.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat

SASARAN 5 : MENINGKATNYA MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Mutu dan keamanan pangan didefinisikan sebagai kondisi mempertahankan kualitas pangan dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu (fisik), merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.

Dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan segar khususnya pangan segar asal tumbuhan, Kementrian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan. Salah satu yang diatur dalam Permentan ini adalah tentang mekanisme pendaftaran pangan segar asal tumbuhan sebagai bentuk penjaminan keamanan pangan segar bagi masyarakat.

Untuk menjamin bahwa penanganan pangan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik, maka unit usaha pangan hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian dari pihak yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengakuan tersebut diberikan setelah melalui berbagai tahap penilaian dan memenuhi berbagai persyaratan yang terstandarisasi terhadap pelaku usaha diantaranya adalah



Sertifikasi Prima, Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) berupa Registrasi PSAT Pelaku Usaha Rice Milling Unit, Registrasi PSAT bagi Pelaku Usaha Agribisnis (non beras) dan Registrasi Rumah Kemas

Sasaran Meningkatnya mutu dan keamanan pangan segar dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.13 : Indikator Pengukur Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	90%	90%	100%	111%

Sumber : Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025

Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat diukur dari jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi dari hasil pemeriksaan sampel dibandingkan total sampel pangan disuatu tempat pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran ini adalah 111% dengan indikator kinerja persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat, target kinerja 90% dan realisasi 100%. Pencapaian ini termasuk kategori Sangat Baik, karena melebihi 100%

Pengambilan sampel dilakukan dari tingkat produsen (petani) dan pasar pada dua lokus kecamatan yakni Kec. Lembah Gumanti dan Kec. IX Koto Sungai Lasi. Sampel yang diambil terdiri dari 5 komoditi yakni Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai hijau dan Tomat. Dari hasil uji laboratorium, walaupun ada sampel yang terindikasi residu pestisida, masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Sehingga 5 komoditi yang diuji dinyatakan negative dan layak untuk dikonsumsi. Pengujian sampel dilakukan melalui pengujian Laboratorium Keamanan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persentase keamanan pangan segar yang aman dikonsumsi berdasarkan uji laboratorium pestisida tahun 2025 adalah 100,00% yang mana dari 5 sampel pangan yang diuji tidak ditemukannya cemaran kimia yang melebihi ambang batas.

Perkembangan capaian target keamanan pangan tahun 2023-2025 dapat digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 2.14 : Perkembangan Ketersediaan Bahan Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi Masyarakat Tahun 2023-2025

No	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			% Capaian			Target 2027	% Capaian Renstra
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
1	Persentase bahan pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat (%)	80	80	90	100	100	100	125	125	111	90	111

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025



SASARAN 6 : PENINGKATNYA DIVERSIFIKASI PANGAN MASYARAKAT

Peningkatan Diversifikasi Pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) didefenisikan sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Tujuan utama diversifikasi pangan adalah membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat dapat diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.15 : Indikator Pengukur Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,10	89,5	95,1	106,25%

Sumber : Data Susenas 2025

Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan dengan formulasi Angka Kecukupan Gizi dikali dengan bobot. Penghitungan skor PPH ini menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Kabupaten Solok berdasarkan data Susenas adalah 95,1. Untuk melihat pola atau tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat diukur melalui sistem Pola Pangan Harapan (PPH). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah suatu komposisi pangan yang seimbang untuk dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk. Pola Pangan Harapan ini mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif dan produktif untuk menghasilkan suatu komposisi normal atau standar pangan dalam memenuhi kebutuhan gizi penduduk, sekaligus untuk mempertimbangkan keseimbangan gizi, cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli.

Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Diversifikasi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu gizi dengan pola konsumsi yang lebih beragam.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 capaian kinerja peningkatan diversifikasi pangan adalah 106,25%, dengan target 89,5 dan realisasi 95,1. Pencapaian ini termasuk kategori Sangat Baik.

Walaupun skor PPH berdasarkan data Susenas melebihi target tapi pencapaian ini masih tidak merata ke semua kelompok pangan, dimana konsumsi pada masing-masing kelompok pangan ada yang naik dan ada yang berkurang. Ada di dalam satu kelompok pangan yang hanya didominasi oleh satu komoditi saja, Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Terbatasnya pendapatan dan daya beli masyarakat dalam menyediakan makanan yang beragam, bergizi dan seimbang;
2. Terbatasnya ketersediaan bahan makanan ditingkat rumah tangga
3. Budaya/kebiasaan makan dimasing-masing daerah/keluarga, karena ada faktor suka atau tidak suka dalam mengkonsumsi pangan tertentu;



4. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pola makan beragam bergizi seimbang dan aman.

SASARAN 7 : MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI

Tata kelola organisasi yang baik (*good organization governance*) dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak Manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif.

Tujuan Meningkatkan Kinerja Organisasi merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan, pengendalian sumber daya, pelaksanaan kebijakan termasuk hasil pencapaian tujuan dan sasaran baik berupa keberhasilan atau kegagalan yang dilaporkan dala Laporan Pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.

Sasaran Meningkatkan tata kelola organisasi dapat diukur dengan 1 (satu) indikator Kinerja Utama seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.16 : Indikator Pengukur Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian
1	Indeks Kepuasan Aparatur	NA	2.80	2.83	101,07%

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok 2025

Meningkatnya tata kelola organisasi dapat diukur dari Indeks Kepuasan Aparatur berdasarkan hasil survey terhadap pelayanan kesekretariatan pada Dinas Perikanan dan Pangan tahun 2025. Formulasi penghitungannya adalah nilai rata-rata dari hasil survey pelayanan sekretariat. Terdapat 10 unsur/komponen yang disurvei.

Berdasarkan hasil survey diperoleh Indeks Kepuasan Aparatur sebesar 2,83 dengan mutu Baik. Komponen yang disurvei adalah : 1) Penyediaan ATK untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang; 2) Penyediaan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang; 3) Kecukupan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan (laptop, kendaraan opsional, dll); 4) Kebersihan dan kenyamanan kantor; 5) Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian; 6) Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala, dll) ASN; 7) Pengurusan surat menyurat; 8) Kecepatan proses pelayanan keuangan; 9) Ketepatan waktu pemberitahuan informasi (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan); 10) Fasilitas ruang rapat.

Tabel 2.17 : Skala Pengukuran

Nilai interval IKM	Mutu Pelayanan	Nilai interval Konversi IKM	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 - 1,75	D	25,00 - 43,75	Tidak Baik
1,76 - 2,50	C	43,76 - 62,50	Kurang Baik
2,51 - 3,25	B	62,51 - 81,25	Baik
3,26 - 4,00	A	81,26 - 100,00	Sangat Baik



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 capaian kinerja Meningkatnya tata kelola organisasi adalah 101,07%, dengan target 2,80 dan realisasi 2,83. Pencapaian ini termasuk kategori Baik. Sedangkan jumlah nilai yang diperoleh adalah 64,31% dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecukupan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan (laptop, kendaraan opsional, dll) dengan nilai 0,32.
2. Penyediaan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang dengan nilai 0,30.
3. Kecukupan sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan (laptop, kendaraan opsional, dll) dengan nilai 0,24.
4. Kebersihan dan kenyamanan kantor dengan nilai 0,28.
5. Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian dengan nilai 0,27.
6. Pelayanan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala, dll) ASN dengan nilai 0,29.
7. Pengelolaan surat menyurat dengan nilai 0,29.
8. Kecepatan proses pelayanan keuangan dengan nilai 0,28.
9. Ketepatan waktu pemberitahuan informasi (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan) dengan nilai 0,27.
10. Fasilitas ruang rapat dengan nilai 0,28.

Dari hasil survey tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Aparatur pada Dinas Perikanan dan Pangan pada tahun 2025 dengan mutu pelayanan kategori B dan kinerja pelayanan BAIK. Indikator kinerja program ini dicapai melalui hasil survey yang dilakukan dilingkup Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2025.

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 5 kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 6 dokumen realisasi 6 dokumen dan capaian 100,00%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan perangkat daerah dengan target 14 laporan, realisasi 14 laporan dan capaian 100,00%.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan sarana, prasarana dan pelayanan administrasi perkantoran dengan target 100,00%, realisasi 93% dan capaian 93%. Karena ada beberapa perjalanan dinas yang tidak bisa dilaksanakan
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100,00%, realisasi 83 %dan capaian 83%. Karena tidak jadi terlaksana penambahan daya listrik kantor serta berlebihnya anggaran karangan bunga.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan target 100,00%, realisasi

--	--

85% dan capaian 85%. dikarenakan berlebihnya anggaran belanja jasa tenaga supir beserta iuran jaminan asuransi supir.

Untuk pencapaian target kinerja Meningkatnya tata kelola organisasi tahun 2025 terdapat efesiensi penggunaan sumberdaya diantaranya adalah adanya efesiensi anggaran kegiatan sebesar Rp. 582.741.776,- yang merupakan sisa kegiatan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk Meningkatnya tata kelola organisasi adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur.
- 2. Meningkatkan tata kelola organisasi melalui penyediaan sarana prasarana aparatur yang memadai.
- 3. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan aparatur secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

--	--

Tabel. 2.18
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok

K O D E	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025					Target dan Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daera s/d Tahun 2025	
							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Taun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10	11
2.09	URUSAN BIDANG PANGAN														
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama (beras) perkapita (kg/kap/th)	669,82 kg/kap/th	922.399.707	446,53 kg/kap/th	1.188.842.809	633 kg/kap/thn		340,36 kg/kap/thn	0	53,76	633 kg/kap/thn	340.627.484	185,5	27,69
2.01	Keg. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	922.399.707	60%	1.188.842.809	0	0	0	0	0	0	0		
	Sub. Keg Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan				2 Unit lumbung pangan saja	1.188.842.809	0	0	0	0		0	0		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah komoditi pangan strategis yang terkendali harganya	7 komoditi	46.000.000	4 komoditi	224.355.537	11 komoditi	90.824.919	11 komoditi	77.836.631	100%	11 komoditi	77.836.631	1	100
2.01	Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	Persentase pemenuhan Cadangan Pangan Kab/Kota	10%	113.591.240	0	0	10%	42.762.800	2,8%	42.333.000	28%	2,8%	189.137.254	2,8%	28%
	Sub Keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					2.884 kg	42.762.800	2.884 kg	40.908.000	100	2.884 kg	40.908.000		
2.02	Keg Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penurunan fluktuasi harga	0,6 0%	44.000.000		106.683.705		90.824.919		77.836.631		2 lap	77.836.631	0,3	50

--	--

	Sub. Keg Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan					2 lap	85.135.219	2 lap	72.586.631	100	2 lap	72.586.631		
	Sub. Keg Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah neraca pangan yang disusun					3 dok	5.689.700	3 dok	5.250.000	100	3 dok	5.250.000		
2.03	Keg. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen harga minimum pangan lokal yangg disusun	1 dok	2.000.000	0	0	1 dok	0	0	0		0	0	0	0
2.04	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Taget Kosumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pemenuhan Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	61,50%	70.000.000	50,5%	313.118.302	60%	674.713.690	50,5%	656.445.840	84,17	60%	656.445.840	25	40,65
	Sub. Keg Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						3 lap	674.713.690	3 lap	656.445.840	100	3 lap	656.445840		
	Program Penanganan Kerawananan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	9,46%	250.000.000	13,51	0	13,51	0	6,76	0	199,85	0	0	0	0
	Keg. Penanganan Kerawanana Pangan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Bantan Paket Bahan Pangan	100 paket	250.000.000	694 paket	103.311.400	100 paket	113.663.209	725 paket	106.677.500	725	725 paket	106.677.500	725	725
	Sub Keg. Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah paket bantuan untuk balita gizi buruk/gizi buruk					100 paket	113.663.209	725 paket	106.677.500	725	725 paket	106.677.500		
	Keg. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Disusun	1 dok	20.000.000	1 dok	0	1 dok	0	1 dok	0	100	0	0		
2.09 .05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	10 komoditi	162.775.384	8 komoditi	176.114.867	5 komoditi	13.145.840	5 komoditi	12.728.600	100	5 komoditi	12.728.600	5	100
2.01	Keg. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	100%	162.775.384	100%	176.114.867	100%	13.145.840	100%	12.728.600	100	100%	12.728.600	5	100
	Sub. Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				5 sample	176.114.867	1 dok	13.145.840	1 dok	12.728.600	100	100%	12.728.600		

--	--

3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAM DAN PERIKANAN														
3.25 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang terlaksananya urusan pemerintah daerah	100%	5.903.252.445	100%	12.691.596.950	100%	4.053.018.153	100%	3.743.004.180	100	100%	3.743.004.180	100	92,3
2.01	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dok	298.707.000	17 dok	620.871.867	6 dok	192.757.428	6 dok	184.821.180	100	6 dok	184.821.180	6	100
	Sub. Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					1 dok	84.014.112	1 dok	79.212.556	100	1 dok	79.212.556		
	Sub. Keg Kooordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD					1 dok	1.657.500	1 dok	1.050.000	100	1 dok	1.050.000		
	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD					1 dok	1.887.000	1 dok	878.000	100	1 dok	878.000		
	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					3 dok	105.198.816	3 dok	103.680.624	100	3 dok	103.680.624		
2.02	Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	14 dok	4.499.657.257	36 lap	8.742.382.137	14 lap	2.950.847.412	14 lap	2.740.234.798	100	14 lap	2.740.234.798	14 lap	100
	Sub. Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN					23 org	2.947.787.412	23 org	2.737.755.298	100	23 org	2.737.755.298		
	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD					1 dok	1.455.000	1 dok	1.279.500	100	1 laporan	1.279.500		
	Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD					13 lap	1.605.000	13 dok	1.200.000	100	13 laporan	1.200.000		
2.03	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana prasarana dan pelayanan administrasi perkantoran	100%	531.100.000	100%	1.739.085.666	100%	356.062.123	100%	347.115.867	100	100%	347.115.867	100	100
	Sub. Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					1 paket	7.435.350	1 paket	7.337.425	100	1 paket	7.337.425		

--	--

	Sub. Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					1 paket	18.450.000	1 paket	14.985.000	100	1 paket	14.985.000		
	Sub. Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan					1 paket	58.000.400	1 paket	54.737.050	100	1 paket	54.737.050		
	Sub. Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					1 paket	23.257.373	1 paket	21.647.975	100	1 paket	21.647.975		
	Sub. Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					1 laporan	248.919.000	1 laporan	248.408.417	100	1 laporan	248.408.417		
2.04	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	107.463.188	100%	191.008.654	100%	67.822.680	100%	55.958.948	100	100%	55.958.948	100	100
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					1 laporan	1.995.675	1 laporan	1.900.000	100	1 laporan	1.900.000		
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan					1 laporan	41.808.740	1 laporan	32.316.948	100	1 laporan	32.316.948		
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					1 laporan	10.350.000	1 laporan	10.350.000	100	1 laporan	10.350.000		
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					1 laporan	13.668.265	1 laporan	11.392.000	100	1 laporan	11.392.000		
2.05	Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	441.325.000	100%	1.398.248.626	100%	485.528.510	100%	414.873.387	100	100%	414.873.387	100	100
	Sub. Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					25 unit	285.626.746	25 unit	242.085.569	100	25 unit	242.085.569		
	Sub. Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					10 org/bln	199.901.764	10 org/bln	172.787.818	100	10 org/bln	172.787.818		
3.25 .03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	5,6 %	1.490.458.961	49,26%	111.654.085	5,6	109.165.371	12,05%	94.382.285	215,17	5,6%	94.382.285	12,05	215,17
2.01	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan/Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	35 unit	1.270.458.961	59 unit	848.197.877	6 unit	109.165.371	6 unit	94.382.285	100	6 unit	94.382.285	0	
	Sub Keg Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	jumlah kelompok yang terbina					12 klp	109.165.371	12 klp	94.382.285	100	12 klp	94.382.285		

--	--

	Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	10 klp	220.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10	0		
	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase nagari yang telah menyusun regulasi penggunaan alat tangkap	6,76%	400.000.000	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0
	Keg. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kota/kab	Jumlah dokumen Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genagan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota	1 dok	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	0	0	0
3.25 .04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidays(%)	9,30%	768.693.861	79,48%	2.512.932.849	8,95	1.149.561.066	7,66%	1.044.406.500	85,58%	8,95%	1.044.406.500	7,66%	85,58
	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan	10	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
	Keg. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	10	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	
2.02	Keg Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya yang diberdayakan	6,76%	20.000.000	20 klp	92.120.650	20 klp	24.693.212	4 klp	16.054.422	20	20 klp	16.054.422	4 klp	20
	Sub. Keg Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase jumlah pelaku usaha perikanan yang ikut pelatihan					20 klp	24.693.212	4 klp	16.054.422	20	20 klp	16.054.422		
2.04	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pengembangan kelompok budidaya perikanan	100 klp	728.693.861	79 klp	2.501.680.190	100 klp	1.124.867.854	43 klp	1.028.352.078	43	100 klp	1.028.352.078	43 klp	43
	Sub Keg Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penyedia prasarana perikanan					1 unit	389.987.176	1 unit	371.029.178	100	1 unit	371.029.178		
	Sub Keg Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penyedia sarana perikanan					5 unit	718.409.599	5 unit	642.654.200	100	5 unit	642.654.200		
	Sub. Keg Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kasus dan pengujian kualitas perairan di kelompok dan UPR					10 klp	4.047.315	12 klp	3.981.100	120	10 klp	3.981.100		
	Sub. Keg Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Persentase jumlah kelompok pembudidayaan ikan yang di berikan pembinaan					30 klp	12.423.764	31 klp	10.687.600	103,33	30 klp	10.687.600	31 klp	103,33

--	--

3.25 .06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (kg)	103.10 0 kg	128.115.643	179.331 kg	792.513.062	77.990 kg	148.064.225	74.509 kg	130.236.341	95,53	77.990 kg	130.236.341	74.509 kg	95,53
	Keg. Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1 rekomen dasi	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.02	Keg Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah kelompok pengolah yang mengalami peningkatan SDM Mutu dan Keamanan hasil Perikanan	22 klp	45.115.643	44 klp	157.776.713	24 klp	12.637.467	24 klp	10.310.309	100	24 klp	10.310.309	24 klp	100
	Sub. Keg Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok yang terbina					24 klp	12.637.467	24 klp	10.310.309	100	24 klp	10.310.309		
2.03	Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan	0,6 ton	78.000.000	14 kec	634.736.349	14 kec	135.426.788	14 kec	119.926.032	100	14 kec	34.994.200	14 kec	100
	Sub. Keg Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi gemar makan ikan					14 kec	135.426.788	14 kec	119.926.032	100	14 kec	34.994.200		

--	--

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota masih belum optimal

Melihat kondisi tersebut di atas maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berupaya untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

- 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
- 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan Wajib Ketahanan Pangan dan urusan pilihan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 2.19 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024 (thnn- 2)	2025 (thn n- 1)	202 6 (thn n)	2027 (thn n+1)	2025 (thn n- 2)	2026 (thn n-1)	2026 (thn n)	2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan produksi perikanan			8,23	8,55	8,61	8,73	9,87	-	8,61	8,73	
2	Angka Konsumsi Ikan			40,10	21,98	22	22,30	20,05	-	22	22,30	
3	Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita			645,20	657,40	-	-	472,51	-	-	-	
4	Persentase Coefisien Variasi harga pangan strategis ditingkat konsumen dan produsen			9,80	9,50	-	-	12,08	-	-	-	
5	Persentase bahan pangan segar yang aman			80	80	90	90	100	-	90	90	

--	--

	dikonsumsi masyarakat											
6	Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH)			86,5	87,50	90,1	90,6	95,1	-	90,1	90,6	
7	Indeks Kepuasan Aparatur			2,75	2,80	2,85	-	2,83	-	2,85	-	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sektor perikanan dan pangan memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional umumnya dan Kabupaten Solok khususnya. Kabupaten Solok mempunyai keunggulan komparatif di bidang perikanan dan pangan, dengan berbagai potensi yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai komoditi seperti pangan, hortikultura, peternakan maupun perikanan. Potensi yang dimiliki antara lain iklim dan agro ekosistem yang sesuai, tersedianya sumberdaya genetik yang melimpah, tersedianya SDM (petani dan petugas), dukungan kebijakan pemerintah dan jumlah penduduk yang besar.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok, perlu dilakukan analisa terhadap kondisi objektif perikanan dan ketahanan pangan. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Solok masih menghadapi berbagai tantangan berkenaan dengan penerapan teknologi, kondisi sumberdaya alam, prasarana dan sarana produksi, sumberdaya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi.

Tantangan Pelayanan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok berdasarkan analisa Renstra Dinas Perikanan dan Pangan, analisa RPJMD Kabupaten Solok, analisa RTRW, dan analisa KLHS yang sekaligus merupakan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan

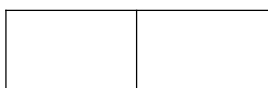
Berkembangnya bagan di wilayah Danau Singkarak yang termasuk wilayah Kabupaten Solok dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil berjumlah 175 unit dengan rincian : Nagari Kacang 23 unit, Nagari Tikalak 45 unit, Nagari Singkarak 3 unit, Nagari Saniangbaka 62 unit, Nagari Muaro Pingai 25 unit dan Nagari Panninggahan 17 unit. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Bung Hatta bekerja sama dengan Dinas Perikanan hasil tangkapan dari bagan terdiri dari 19,56% larva, 32,90% juvenil dan 47,33% ikan bilih dewasa. Artinya sebanyak 52,55% ikan yang tertangkap tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan data tersebut tingkat keberlanjutan kelestarian ikan bilih sangat rendah (terancam).
2. Masih kurangnya diversifikasi pengolahan hasil perikanan di kalangan masyarakat
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan.

Untuk memenuhi kebutuhan benih ikan ini di Kabupaten Solok sudah dibangun Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Nagari Sungai Janieh Kecamatan Gunung Talang dan instalasi yang berada di Nagari Koto baru Kecamatan Kubung.

Namun BBI sendiri sampai saat ini belum berfungsi optimal sehingga masih perlu ditingkatkan untuk menunjang peningkatan produksi ikan air tawar. Di samping itu masyarakat Kabupaten Solok juga sudah dapat memproduksi benih sendiri melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang sudah berjumlah 76 unit sampai dengan akhir tahun 2025. Namun



- untuk memenuhi permintaan akan benih dan induk ikan di Kabupaten Solok masih belum mencukupi dan masih didatangkan dari luar daerah.
4. Masih kurangnya diseminasi teknologi perikanan di tengah masyarakat Secara umum usaha perikanan masih merupakan usaha sampingan di samping usaha utama masyarakat Kabupaten Solok yang merupakan petani. Usaha perikanan masih dilaksanakan secara tradisional dengan skala usaha yang masih kecil. Sedangkan untuk peningkatan nilai tambah baru beberapa masyarakat yang mampu melaksanakan teknologi pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar kelayakan produk.
 5. Alih fungsi lahan ke non pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan ke non pertanian berdampak terhadap produksi bahan pangan masyarakat yang berasal dari sektor pertanian, perikanan dan peternakan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya sangat tergantung pada lahan pertanian yang akhirnya akan mengganggu stabilitas ketahanan dan kedaulatan pangan masyarakat. Lahan pertanian Kabupaten Solok pada tahun 2025 berdasarkan Solok dalam angka tahun 2025 seluas 333.147 Ha sedangkan keadaan tahun 2024 seluas 333.162 Ha.
 6. Masih adanya daerah rawan pangan di Kabupaten Solok Berdasarkan peta rawan pangan tahun 2025 masih terdapat daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Solok sebanyak 2 Nagari (2,7%) dari 74 Nagari yang ada, yaitu Garabak Data dan Katialo).
 7. Masih ditemukannya pangan yang terpapar zat pestisida yang dikonsumsi masyarakat. Walau kandungan zat nya masih dibawah ambang batas.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang setiap tahun dilakukan masih ditemukan adanya kandungan zat/residu yang berbahaya yang ditemukan pangan segar yang dijual masyarakat dan demikian juga halnya dengan pangan olahan.
Teknik bercocok tanam yang banyak digunakan saat ini oleh petani di Kabupaten Solok adalah teknik budidaya yang banyak memanfaatkan zat kimia buatan seperti pupuk buatan, insektisida, fungisida, herbisida, pestisida dan zat lainnya yang mendukung produksi tanaman pangan dan hortikultura. Pemanfaatan zat kimia buatan tersebut mampu merusak keseimbangan ekosistem dan mengganggu kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. Hal tersebut mengganggu tujuan penyediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan bagi konsumsi masyarakat serta tujuan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber pangan nasional.
Di samping teknik budidaya produksi, bahan pangan yang beredar di pasar perlu diawasi karena adanya sebagian oknum pedagang dan produsen menambahkan zat kimia yang tidak aman dikonsumsi oleh manusia ke dalam bahan pangan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa, tampilan, dan umur penyimpanan. Rendahnya pengawasan terhadap peredaran bahan pangan yang beredar menghambat terpenuhinya tujuan penyediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat.
 8. Masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan ditentukan oleh skor pola pangan harapan (PPH). Untuk Kabupaten Solok skor PPH sudah tinggi, namun masih ditemukan fakta masih adanya kebiasaan buruk dalam pola konsumsi di sebagian masyarakat Kabupaten Solok karena



- keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, seimbang dan aman, kebiasaan konsumsi beras/nasi sebagai pangan pokok yang wajib dimakan setiap jadwal makan serta berkembangnya industri pangan yang siap saji.
9. Fluktuasi harga pangan pokok strategis
Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi menurun sehingga kondisi ketahanan pangan terganggu.

Sedangkan peluang Dinas Perikanan dan Pangan terhadap peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

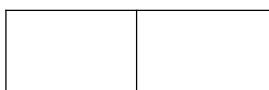
1. Potensi sumberdaya alam yang mendukung usaha perikanan
2. Tingginya minat masyarakat dalam membudidayakan ikan
3. Tingginya permintaan akan hasil perikanan
4. Berkembangnya teknologi perikanan yang ramah lingkungan
5. Terbukanya peluang investasi untuk pengembangan perikanan dan pangan melalui skim pembiayaan dalam bentuk kredit dengan bunga rendah
6. Minat masyarakat untuk melakukan usaha pengolahan perikanan
7. Dukungan kebijakan pemerintah propinsi dan pusat dalam sektor perikanan dan ketahanan pangan
8. Potensi produksi bahan pangan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
9. Tingginya permintaan masyarakat akan bahan pangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya gizi sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk
10. Tumbuhnya industri-industri pangan olahan
11. Tersedianya sumberdaya lahan pekarangan yang cukup luas di setiap rumah tangga
12. Peningkatan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan
13. Tersedianya beranekaragam produk bahan pangan dan olahan pangan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2027, Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Solok Tahun 2027 agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah.

Pengusulan program dan kegiatan masyarakat belum bisa di sebutkan dalam Renja 2027 ini karena belum terlaksananya Musrenbang sebagai bahan usulan dari masyarakat terhadap SKPD. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dapat diperoleh melalui hasil

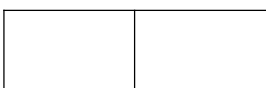


musrenbang mulai dari tingkat nagari sampai dengan forum Perangkat Daerah dan musrenbang propinsi serta adanya usulan kegiatan melalui proposal yang telah disampaikan oleh kelompok masyarakat melalui kelompok tani ternak dan kelompok perikanan.

Usulan/proposal yang berupa pengadaan/bansos pangan ataupun sarana prasarana perikanan untuk tahun 2027 akan diseleksi, diverifikasi dan identifikasi berdasarkan kesiapan SDM penerima manfaat, kelengkapan persyaratan dan administrasi serta kesesuaian kondisi agroklimat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perikanan dan Pangan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2027 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD), agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan



Tabel 20 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Solok

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan dan Pangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	5.499.062.731	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Solok	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	263.050.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Solok	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Solok	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun tepat waktu	14 dokumen	4.239.541.481	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Solok	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun tepat waktu	14 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Solok	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	468.825.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Solok	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Jumlah pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2 unit	20.200.000	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Jumlah pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2 unit		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	90.946.250	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	416.500.000	Keg. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Solok	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%		
URUSAN WAJIB PANGAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN		Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita	657,4 kg/kap/thn	860.929.351	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan		Jumlah ketersediaan pangan utama perkapita	657,4 kg/kap/thn		

--	--

	KEMANDIRIAN PANGAN					Kemandirian Pangan					
	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pemenuhan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	94,59	860.929.351	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pemenuhan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	94,59		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	40%	98.290.872	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah	40%		
	Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pemenuhan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10	98.290.872	Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pemenuhan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	10,81%	230.000.000	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	10,81%		
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah bantuan paket bahan pangan	100 paket	230.000.000	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase penanganan kerawanan pangan	100 paket		
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerantanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Solok	Peta kerantanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun	1 dokumen	20.000.000	Kegiatan Penyusunan Peta Kerantanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Solok	Peta kerantanan dan ketahanan pangan kecamatan yang disusun	1 dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Jumlah komoditi pangan strategis yang terkendali harganya	7	46.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Jumlah komoditi pangan strategis yang terkendali harganya	7		
	Keg. Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Solok	Persentase penurunan fluktuasi harga	0.30	44.000.000	Keg. Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Solok	Persentase penurunan fluktuasi harga	0.30		
	Keg. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi	Kab. Solok	Jumlah dokumen harga minimum pangan lokal yang disusun	1 dokumen	2.000.000	Keg. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi	Kab. Solok	Jumlah dokumen harga minimum pangan lokal yang disusun	1 dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN		Skor PPH Konsumsi	90,1	70.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN		Skor PPH Konsumsi	90,1		



	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Solok	Jumlah kelompok yang difasilitasi/dibantu dalam penyediaan pangan yang beragam tingkat rumah tangga	3	70.000.000	Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Solok	Jumlah kelompok yang difasilitasi/dibantu dalam penyediaan pangan yang beragam tingkat rumah tangga	3		
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	10	158.591.921	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	10		
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	100%	158.591.921	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Persentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	100%		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1.100,19 ton	1.391.132.127	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1.100,19 ton		
	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	10 unit	1.171.132.127	Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	10 unit		
	Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Kab. Solok	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	1 klp	220.000.000	Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Kab. Solok	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	1 klp		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	5.708,22 ton	717.466.736	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kab. Solok	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	5.708,22 ton		
	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan	2	6.000.000	Keg. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha budidaya perikanan	2		
	Keg. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	10	6.000.000	Keg. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK)	10		
	Keg. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Solok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil	20 klp	20.000.000	Keg. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Solok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil	10 klp		

--	--

			yang mengikuti pengembangan kapasitas					yang mengikuti pengembangan kapasitas			
	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Solok	Jumlah pengembangan kelompok budidaya perikanan	100 kelompok	685.466.736	Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Solok	Jumlah pengembangan kelompok budidaya perikanan	100 kelompok		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Angka Konsumsi Ikan	22 kg/kap	119.577.789	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Angka Konsumsi Ikan	22 kg/kap		
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Solok	Jumlah kelompok pengolah yang mengalami peningkatan SDM mutu dan keamanan hasil perikanan	22 kelp	40.577.789	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Solok	Jumlah kelompok pengolah yang mengalami peningkatan SDM mutu dan keamanan hasil perikanan	22 kelp		
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	0,600 ton	74.000.000	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	0,6 ton		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Luas Kawasan Konservasi	0	350.000.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Luas Kawasan Konservasi	0		-
	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah dokumen Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota	1 dok	350.000.000	Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Solok	Jumlah dokumen Pengawasan Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam Kab/Kota	50 dok		-
	TOTAL				9.563.451.710	TOTAL					

--	--

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

Pembuatan Renja 2027 dilakukan pada awal tahun 2026, maka merujuk ke RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

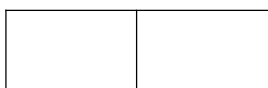
Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 adalah Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diwujudkan dalam delapan Misi yang dikenal sebagai Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Presiden menetapkan beberapa arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Asta Cita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Arahan tersebut mencakup :

1. Pemerintah bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, termasuk rakyat kecil dan tertinggal.
2. Setiap aspirasi yang murni akan dihormati dan ditindaklanjuti.
3. Aparat ditugaskan untuk melindungi keselamatan warga serta menjaga fasilitas umum.
4. Memastikan koordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik termasuk dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
5. BIN diminta sigap melaporkan dinamika lapangan dan TNI menjaga keamanan wilayah serta mencegah penyalahgunaan SDA.
6. Kapolri dan Jaksa Agung didorong mempercepat proses hukum terhadap pelanggaran

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.



Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni :

- 1) Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan :
 - a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
 - b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
 - c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
 - d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
- 2) Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan *Global Power Index* menjadi peringkat 29 di tahun 2029
- 3) Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan :
 - a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
 - b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
 - c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
- 4) Sasaran Pembangunan 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
- 5) Sasaran Pembangunan 5 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju net Zero emission yang ditandai dengan :
 - a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2029
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029.

Untuk mencapai target dalam Asta Cita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, diversifikasi dan penguatan pasokan, (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian melalui hilirisasi dan pengembangan produk turunan bernilai tinggi dan (3) Mewujudkan pengelolaan Kementarian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sasaran utama pembangunan 2025-2029 adalah (1) meningkatnya pendapatan per kapita, (2) pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, (4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia, (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun internasional. Salah satu tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan dengan luas kurang dari setengah hektar.

Untuk itu, peningkatan produksi komoditas pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian diarahkan mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dan hasilnya dirasakan oleh petani dengan adanya kenaikan tingkat kesejahteraan petani.

Percepatan pembangunan di berbagai bidang termasuk di sektor perikanan dan pangan dapat diwujudkan melalui pengembangan struktur perekonomian yang kokoh berbasis keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu,



pembangunan sektor pertanian dituntut bisa meningkatkan ketahanan pangan dan daya saingnya guna mendukung terwujudnya pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Pangan

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka panjang tahun 2025-2045 yakni: *“Transformasi pangan dan pertanian sebagai cara mewujudkan visi berdaulat, maju dan berkelanjutan”*. Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

BKP mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu Mewujudkan Ketahanan Pangan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamankan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan tahun 2025-2029 adalah: penguatan ketersediaan, stabilitas pasokan dan harga serta peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, infrastruktur yang lebih baik, distribusi yang efisien dan pemberdayaan petani skala kecil.

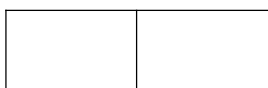
Kebijakan ketahanan pangan difokuskan pada: (a) peningkatan produksi melalui subsidi pupuk, pencetakan sawah baru, intensifikasi lahan dan penyediaan alat mesin pertanian; (b) penguatan rantai pasok; (c) stabilitas harga dan ketersediaan; (d) peningkatan kualitas konsumsi dan (e) pemberdayaan masyarakat.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Yang menjadi visi pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Sedangkan yang menjadi misi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.



Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2025-2029, terdiri dari:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Faktor penghambat yang menyebabkan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya ketersediaan bibit ikan yang berkualitas;
2. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan dan pangan serta infrastruktur pendukung;
3. Masih sedikit petani dan pembudidaya ikan/nelayan yang mampu ataupun yang mengolah hasil produk perikanan dan pangan dan menguasai pasar sehingga nilai tukar masih rendah;
4. Berkembangnya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
5. Pengembangan agribisnis dari hulu sampai ke hilir dalam bentuk kawasan belum optimal pelaksanaannya ;
6. Masih banyaknya pembudidaya yang belum menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) bagi pembudidaya dan pembenih ikan dan HACCP;
7. Masih kurang SDM perikanan dan pangan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029.

Tujuan yang ingin dicapai pada Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok pada Renstra 2025-2029 adalah Mewujudkan ketersediaan pangan dan produksi perikanan yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran, kendala, tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran pada Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2027 untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan masih mengacu pada Renstra dan RPJMD tahun 2025-2029 sebagai mana berikut :

--	--

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Mewujudkan ketersediaan pangan dan perikanan yang berkelanjutan		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)	5.34
		Produktivitas perikanan	68.27
	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	85
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	8.61
	Meningkatnya akuntabilitas kesempatan kerja dan produktivitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	74.65

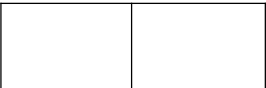
Sumber : Renstra Dinas Perikanan dan Pangan 2025-2029

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

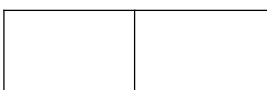
Rencana program kegiatan tahun 2027 disusun berdasarkan potensi ekonomi masyarakat yang umumnya hidup bertani dan berusaha dibidang perikanan dan pangan serta mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih yakni antara lain dalam upaya pencapaian visi “Kabupaten Solok Terbaik, Maju dan Berkelanjutan”. Serta dalam upaya untuk mencapai misi yakni Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata. Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 9 program (5 Program di Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan 4 Program di Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan) dan 20 kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Perikanan dan Pangan pada anggaran tahun 2027 dengan rencana alokasi dana Rp. 6.663.060.163,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Solok. Rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan dana sebesar Rp. 4.177.060.163,- dengan 5 kegiatan
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan dana Rp. 180.000.000,- dengan 2 kegiatan.
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan dana Rp. 1.000.000.000,- dengan 2 kegiatan.
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan dana Rp. 1.000.000,- dengan 1 kegiatan.
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,- dengan 2 kegiatan.



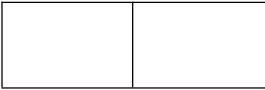
6. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan dana sebesar Rp. 11.000.000,- dengan 1 kegiatan .
7. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan dana Rp. 900.000.000,- dengan 3 kegiatan .
8. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan dana sebesar Rp. 17.000.000,- dengan 1 kegiatan.
9. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan dana sebesar Rp. 127.000.000,- dengan 2 kegiatan.



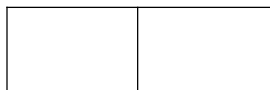
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028
KABUPATEN SOLOK

Nama PERANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan dan Pangan

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Dana/Pagu Indikatif			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana 2028	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	7	8	9	10
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				5.232.060.163			5.248.864.988
		1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%		4.177.060.163			4.185.378.993
		1	2	0	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen		162.100.000			169.200.000
		1	2	0	1	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	Kab. Solok	82.000.000		1 dokumen	84.000.000
		1	2	0	1	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Kab. Solok	3.000.000		1 dokumen	3.000.000
		1	2	0	1	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Kab. Solok	2.100.000		1 dokumen	2.200.000



		1	2	0 1	0 0 6	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	Kab. Solok	75.000.000		3 laporan	80.000.000
		0 1	2	0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun tepat waktu	14 dokumen		3.217.637.957		14 dokumen	3.185.261.978
		0 1	2	0 2	0 0 1	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bln	Kab. Solok	3.213.437.957		22 orang/bln	3.180.861.978
		0 1	2	0 2	0 0 5	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Kab. Solok	2.100.000		1 laporan	2.200.000
		0 1	2	0 2	0 0 7	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	Kab. Solok	2.100.000		13 laporan	2.200.000
		0 1	2	0 6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		306.322.206		100%	334.917.015
		0 1	2	0 6	0 0 1	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Solok	8.500.000		1 paket	9.000.000
		0 1	2	0 6	0 0 2	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Solok	10.000.000		1 paket	10.000.000
		0 1	2	0 6	0 0 4	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Solok	55.000.000		1 paket	60.000.000
		0 1	2	0 6	0 0 5	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Solok	10.000.000		1 paket	10.000.000



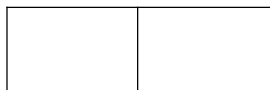
		01	2	06009	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Dalam & luar Kab. Solok	222.822.206		1 laporan	245.917.015
		01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kab. Solok	12.000.000			12.000.000
		01	2	07005	Pengadaan Mebeler	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	Kab. Solok	12.000.000		1 unit	12.000.000
		01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		66.000.000		100%	70.000.000
		01	2	08001	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Kab. Solok	2.000.000		1 laporan	2.000.000
		01	2	08002	Sub Keg. Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Kab. Solok	40.000.000		1 laporan	40.000.000
		01	2	08003	Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	Kab. Solok	13.000.000		1 laporan	15.000.000
		01	2	08004	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Kab. Solok	11.000.000		1 laporan	13.000.000
		01	2	09	Keg. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%		413.000.000			414.000.000
		01	2	09001	Sub Keg. Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25 unit	Kab. Solok	362.000.000		25 unit	363.000.000
		1	2	09009	Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	2 unit	Kab. Solok	51.000.000		2 unit	51.000.000

--	--

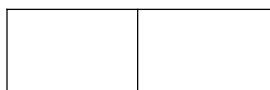
	2	0	0			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			Kab. Solok	11.000.000			11.000.000
		0	2	0		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Solok	11.000.000			11.000.000
			2	0	0	Sub Keg. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	2 unit	Kab. Solok	1.000.000		2 unit	12.918.540
2	0	0				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (skor PPH)	90,6		900.000.000			900.000.000
2	0	0	2	0		Keg. Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penurunan fluktuasi harga	0,60%		160.000.000			165.000.000
2	0	0	2	0	0	Sub keg Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan	Kab. Solok	10.000.000		1 laporan	10.000.000
2	0	0	2	0	0	Sub keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan produsen dan konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 laporan	Kab. Solok	125.000.000		1 laporan	130.000.000
2	0	0	2	0	0	Sub keg. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	Kab. Solok	15.000.000		1 laporan	15.000.000
2	0	0	2	0	0	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	Kab. Solok	10.000.000		1 dokumen	10.000.000

--	--

2	0	0	2	0		Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			Kab. Solok	115.357.172			124.240.210
2	0	0	2	0	0	Sub keg. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 ton	Kab. Solok	115.357.172			124.240.210
2	0	0	2	0		Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah kelompok yang difasilitasi/dibantu dalam penyediaan pangan yang beragam tingkat rumah tangga	1 laporan	Kab. Solok	624.642.828		1 laporan	610.759.790
2	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (laporan)	1 laporan	Kab. Solok	624.642.828		1 laporan	610.759.790
2	0	0				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	5.43%		127.000.000		4.05	127.000.00
2	0	0	2	0		Keg. Penyusunan Peta Kerantanan dan Ketaanan Pangan Kecamatan	Peta kerantanan dan ketaanan pangan kecamatan yang disusun	1 dok	Kab. Solok	10.000.000		1 dok	10.000.000
2	0	0	2	0	0	Sub keg. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 dok	Kab. Solok	10.000.000		1 dok	10.000.000
2	0	0	2	0		Keg. Penanganan Kerawanan Keamanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan paket bahan pangan	100 paket	Kab. Solok	117.000.000			117.000.000
2	0	0	2	0	0	Sub Keg. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Keamanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	Kab. Solok	107.000.000		1 dok	107.000.000
2	0	0	2	0	0	Sub keg. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 dok	Kab. Solok	10.000.000		1 dok	10.000.000



2	0 9	0 4	2			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	90%		17.000.000		90%	17.000.000
2	0 9	0 4	2	0 1		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi masyarakat	10 komoditi	Kab. Solok	17.000.000		10 komoditi	17.000.000
						Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 dok	Kab. Solok	14.000.000		1 dok	14.000.000
						Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 dok	Kab. Solok	3.000.000		1 dok	3.000.000
3	2 5	0 3				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	1.113,90 ton		180.000.000		1.115,69 ton	180.000.000
3	2 5	0 3	2	0 1		Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	15 unit		175.000.000		20 unit	174.000.000
3	2 5	0 3	2	0 1	0 0 0 2	Sub Keg. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (unit)	15 unit	Kab. Solok	175.000.000		20 unit	174.000.000
3	2 5	0 3	2	0 2		Keg. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang Diberdayakan	8 klp	Kab. Solok	5.000.000		8 klp	6.000.000
3	2 5	0 3	2	0 2	0 1	Sub. Keg. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang Meningkatkan Kapasotasnya (orangnya)	12 orang	Kab. Solok	3.000.000		12 orang	3.000.000
3	2 5	0 3	2	0 2	0 0 0 2	Sub. Keg. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	3 klp	Kab. Solok	2.000.000		4 klp	3.000.000



3	2	0				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	5.723,72 ton	Kab. Solok	1.000.000.000		5.739,58 ton	1.000.000.000
3	2	0	2	0		Keg. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	20 klp	Kab. Solok	42.000.000		20 klp	42.000.000
3	2	0	2	0	0	Sub. Keg. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (kelompok)	20 kelompok	Kab. Solok	42.000.000		20 kelompok	42.000.000
3	2	0	2	0		Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pengembangan kelompok budidaya perikanan			958.000.000			958.000.000
3	2	0	2	0	0	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 daerah Kab/kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (unit)	1 unit	Kab. Solok	480.100.000		1 unit	485.000.000
3	2	0	2	0	0	Sub Keg. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam satu daerah kab/kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (dokumen)	48 dokumen	Kab. Solok	9.200.000		48 dokumen	9.200.000
3	2	0	2	0	0	Sub keg. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	48 dokumen	Kab. Solok	2.000.000		48 dokumen	2.000.000
3	2	0	2	0	0	Sub Keg. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3 unit	Kab. Solok	438.700.000		3 unit	433.500.000
3	2	0	2	0	0	Sub keg. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	48 unit	Kab. Solok	26.000.000		48 unit	26.000.000
3	2	0	2	0	0	Sub keg. Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit Pengelolaan Kesehataan Ikan dan Lingkungan yang tersedia	2 unit	Kab. Solok	2.000.000		2 unit	2.000.000
3	2	0				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi	Pokhlasar 26. pokmaswas 29, pokdakan 282, UPR 30	Kab. Solok	1.000.000		Pokhlasar 26. pokmaswas 34, pokdakan 286, UPR 30	1.000.000

--	--

3	2 5	0 5	1	0 2		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kota/kab	3 dok	Kab. Solok	1.000.000		3 dok	1.000.000
3	2 5	0 5	2	0 1	0 0 4	Sub Keg Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pembudidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	48 pelaku usaha	Kab. Solok	300.000		48 pelaku usaha	300.000
3	2 5	0 5	2	0 1	0 0 6	Sub keg Pengawasan Usaha pemasaran hasil penangkapan ikan dan/atau Usaha pengolahan hasil perikanan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil penangkapan ikan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	26 pelaku usaha	Kab. Solok	300.000		26 pelaku usaha	300.000
3	2 5	0 5	2	0 1	0 0 7	Sub keg Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	29 pelaku usaha	Kab. Solok	400.000		34 pelaku usaha	400.000
3	2 5	0 6				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap)	22,30 kg/kap	Kab. Solok	250.000.00		22,55 kg/kap	250.00.000
3	2 5	0 6	2	0 2		Keg. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok pengolah yang mengalami peningkatan SDM mutu dan keamanan hasil perikanan	22 kelp	Kab. Solok	43.000.000	22 kelp	Kab. Solok	43.000.000
3	2 5	0 6	2	0 2	0 0 2	Sub keg. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko	Jumlah unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang nebdapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko	26 Unit usaha	Kab. Solok	43.000.000		26 Unit usaha	43.000.000
3	2 5	0 6				Keg. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	6.837,6 ton	Kab. Solok	207.000.000		6.855,27 ton	207.000.000

--	--

3	2	0	2	0	0	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	6.837,6 ton	Kab. Solok	207.000.000		6.855,27 ton	207.000.000
						TOTAL				6.663.060.163			6.671.378.988

--	--

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Solok tahun 2025-2029. Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Pangan maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 sebagaimana berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mewujudkan ketersediaan pangan dan perikanan yang berkelanjutan		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)	5.34
		Produktivitas perikanan	68.27
	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	85
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	8.61
	Meningkatnya akuntabilitas kesempatan kerja dan produktivitas kinerja Dinas Perikanan dan Pangan	Nilai SAKIP perangkat daerah	74.65

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah untuk pencapaian target indikator kinerja utama dengan program sebagai berikut :

Program	Pagu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.177.060.163
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	180.000.000
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.000.000.000
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	250.000.000
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.000.000
Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	11.000.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	900.000.000
Program Pengawasan Keamanan Pangan	17.000.000
Program Penanganan Kerawanan Pangan	127.000.000
Total	6.663.060.163



BAB V PENUTUP

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2027 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan dan Pangan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh instansi terkait, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka adakalanya rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam renja tidak dapat direalisasikan. Untuk itu akan dilakukan pengusulan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2027, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Serta dapat memberikan pedoman dan arahan bagi stakeholder pembangunan perikanan dan pangan untuk lebih mudah berperan aktif dalam pembangunan.

Lebih dari itu dengan adanya Renja akan dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kinerja Dinas Perikanan dan Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BUPATI SOLOK

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FEBRIZALDI